

**Ketika Milenial
Investasi Saham**

**MILENIAL
ASISAHAM**

Pengalaman Berinvestasi
di Kalimantan Tengah



DIREKTORAT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
SUMBANGAN ALUMNI

NAMA : Kuni Anisa R.]

NIM : 80313393

TGL PENYERAHAN : 8 Mei 2024

**Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pengangguran di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta**

SKRIPSI



Oleh :

Nama : Kuni Anisa Roihatul Jannah
Nomor Mahasiswa : 20313383
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

2024

Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pengangguran di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana
jenjang Strata 1 Program Studi Ekonomi Pembangunan, pada Fakultas Bisnis dan
Ekonomika Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Kuni Anisa Roihatul Jannah
Nomor Mahasiswa : 20313383
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

2024

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti yang dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan FBE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Februari 2024

Penulis,



Kuni Anisa Roihatul Jannah



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Ringroad Utara, Condong Catur, Depok
Sleman, Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 883087, 885376;
F. (0274) 882589
E. fecon@uii.ac.id
W. fecon.uui.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL TES KEMIRIPAN

No.: 278/Ka.Div/10/Div.PP/II/2024

Bismillaahirrahmaanirrahim.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Kuni Anisa Roihatul Jannah**
Nomor Mahasiswa : **20313383**
Dosen Pembimbing : **Riska Dwi Astuti S.Pd., M.Sc.**
Program Studi : **Ekonomi Pembangunan**
Judul Karya Ilmiah : **Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pengangguran di
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**
Nomor HP : **085875904000**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses tes kemiripan (*similarity test*) menggunakan **Turnitin** dengan hasil **12% (dua belas persen)** sesuai aturan batas minimal dinyatakan lolos yang diberlakukan di Universitas Islam Indonesia yaitu sebesar 20% (dua puluh persen).

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 20 Februari 2024

Kepala Divisi Pengelolaan Pengetahuan,



Stuardi, S.IP., M.IP.

PENGESAHAN

Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pengangguran di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta

Nama : Kuni Anisa Roihatul Jannah
Nomor Mahasiswa : 20313383
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 19 Februari 2024

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,



Riska Dwi Astuti S.Pd., M.Sc.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya, saya berhasil menyelesaikan skripsi ini. Pada halaman persembahan ini, saya ingin mengabdikan karya akhir ini untuk keluarga besar saya, khususnya kepada kedua orang tua dan adik-adik saya, yang telah memberikan dukungan besar selama perjalanan ini. Saya merasa beruntung memiliki mereka sebagai pilar pendukung yang tak tergantikan. Saatnya tiba untuk kembali kepada keluarga, membawa kebanggaan dengan gelar SARJANA EKONOMI yang berhasil diraih. Penghargaan ini menjadi buah dari perjuangan bersama dan bimbingan yang tak henti dari keluarga tercinta. Tidak lupa, penghargaan juga saya tujukan kepada sahabat-sahabat yang turut membantu, memberikan semangat, doa, dan mendengarkan segala keluh kesah selama proses penulisan skripsi ini. Terima kasih atas kontribusi dan dukungan yang luar biasa.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam serta junjungan besar kami Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pengangguran di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”. Skripsi ini berisi tentang faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di D.I. Yogyakarta dengan pendekatan beberapa variabel seperti Indeks Pertumbuhan Manusia, Upah Minimum Provinsi, Jumlah penduduk, dan Kemiskinan dan bertujuan untuk mengetahui penyebab, cara menyelesaikan dan mengurangi pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam penulisan skripsi ini tentu banyak hambatan yg dihadapi oleh penulis. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ayah, Ibu, Imam dan Mancung yang telah mendoakan agar skripsi ini dapat dibuat dengan sebaik-baiknya dan memberikan bantuan baik dalam bentuk moril maupun materil.
2. Ibu Riska Dwi Astuti S.Pd., M.Sc. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, ilmu yang bermanfaat serta memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
3. Bapak Rokhedi Priyo Santoso S.E., MIDEc. selaku dosen penguji yang telah memberikan arahan, serta ilmu yang bermanfaat.
4. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
5. Dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika yang telah memberikan banyak bekal ilmu pengetahuan dan mengajarkan banyak hal kepada penulis.
6. Seluruh pihak dari Badan Pusat Statistik yang sangat membantu penulis dalam memperoleh data untuk penelitian.

7. Teman baik panulis, terkhusus Selvi, Ninda, Cupit, Nahyan, Tian, Nabila, Yasmine, Caca, Mila, Sahabat Fawwaz, Grup Seabank trip, Grup Info Hotel Mgl, dan masih banyak lagi. Terima kasih atas kerjasama, dukungan dan berbagai cerita yang diberikan.
8. Kepada Petugas Perpustakaan Kota Magelang dan Barista Cafe Fore, Maja, HoB, CW, Dummin, McD, Sadajiwa, Kobessah, Toxic, dan tempat lain yang sudah menemani penulis hingga ujung shift.
9. Terakhir, terima kasih kepada perempuan bernama Kuni Anisa Roihatul Jannah yang telah bertahan di saat-saat sulit, memilih untuk bangkit setiap kali jatuh, dan terus bergerak maju meskipun terkadang dunia terasa begitu berat. Semoga dengan menghargai diri sendiri, penulis dapat menemukan kekuatan dan keberanian untuk terus maju. Atas segala hal yang telah diperjuangkan, terimakasih banyak! :)

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penulis dan pihak yang membutuhkan, serta membantu pemerintah dalam membuat kebijakan dalam menyelesaikan masalah pengangguran di Provinsi D.I. Yogyakarta maupun Indonesia.

Yogyakarta, 19 Februari 2024

Penulis,



Kuni Anisa Roihatul Jannah

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	ii
Pengesahan.....	iii
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	viii
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II.....	10
2.1 Kajian Pustaka.....	10
2.2 Landasan Teori.....	13
2.2.1 Tingkat Pengangguran Terbuka	13
2.2.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	16
2.2.3 Jumlah Penduduk.....	18
2.2.4 Upah Minimum Provinsi (UMP)	19
2.2.5 Kemiskinan.....	20
2.3 Hipotesis	23
2.4 Kerangka Penelitian.....	24
BAB III.....	25
3.1 Jenis dan Cara Pengumpulan Data.....	25
3.2 Definisi Variabel Operasional.....	25
3.3 Metode Analisis Data	26

3.3.1	Penentuan Metode Estimasi.....	27
3.3.2	Metode Penentuan Model.....	27
3.3.3	Uji Hipotesis	28
BAB IV	29
4.1.	Deskripsi Data Penelitian	29
4.2.	Uji Kesesuaian Model	30
4.2.1.	Uji Hausman	30
4.3.	Model Regresi Terbaik.....	30
4.3.1.	Uji t (Parsial).....	31
4.3.2.	Koefisien Determinasi(R^2)	33
4.3.3.	Uji F (Simultan)	34
4.4.	Pembahasan.....	34
BAB V	37
5.1	Simpulan.....	37
5.2	Implikasi.....	37
Daftar Pustaka	41
Lampiran	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Tingkat Pengangguran Terbuka di DIY tahun 2015-2022.....	2
Gambar 2. 1. Pengangguran Siklikal.....	16

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1. Definisi Variabel Operasional.....	26
Tabel 4. 1. Statistik Deskriptif.....	29
Tabel 4. 2. Hasil pengujian FEM	31

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. Ringkasan Statistik	44
Lampiran B. Hasil Uji Fixed Effect Model.....	44
Lampiran C. Hasil Uji Random Effect Model.....	45
Lampiran D. Hasil Uji Hausman	45
Lampiran E. Data Penelitian	46

ABSTRAK

Masalah pengangguran merupakan tantangan yang dihadapi oleh sebagian besar negara di seluruh dunia, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Indonesia memiliki tingkat pengangguran yang cukup tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari Indeks Pertumbuhan Manusia, Upah Minimum Provinsi, jumlah penduduk, dan tingkat kemiskinan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode analisis yang diterapkan adalah regresi data panel dengan menggunakan model fixed effect. Data sekunder digunakan dalam penelitian ini, dengan mengumpulkan data dari kabupaten/kota di wilayah DIY, seperti Yogyakarta, Sleman, Bantul, Gunung Kidul, dan Kulon Progo, dari tahun 2015 hingga 2022.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM), jumlah penduduk, dan Upah Minimum Provinsi (UMP) secara bersama-sama berdampak signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Yogyakarta dalam periode 2015-2022. Namun, berdasarkan uji t, kemiskinan tidak memiliki pengaruh parsial terhadap variabel TPT. Dengan demikian, strategi untuk menangani pengangguran terbuka di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat melibatkan penempatan atau penambahan sektor industri baru, pelaksanaan pelatihan, dan penarikan investor. Implikasi kebijakan tersebut diharapkan dapat menciptakan peluang kerja baru bagi masyarakat.

Kata Kunci: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT); Indeks Pertumbuhan Manusia; Upah Minimum Provinsi; Jumlah Penduduk; Kemiskinan.

BAB I

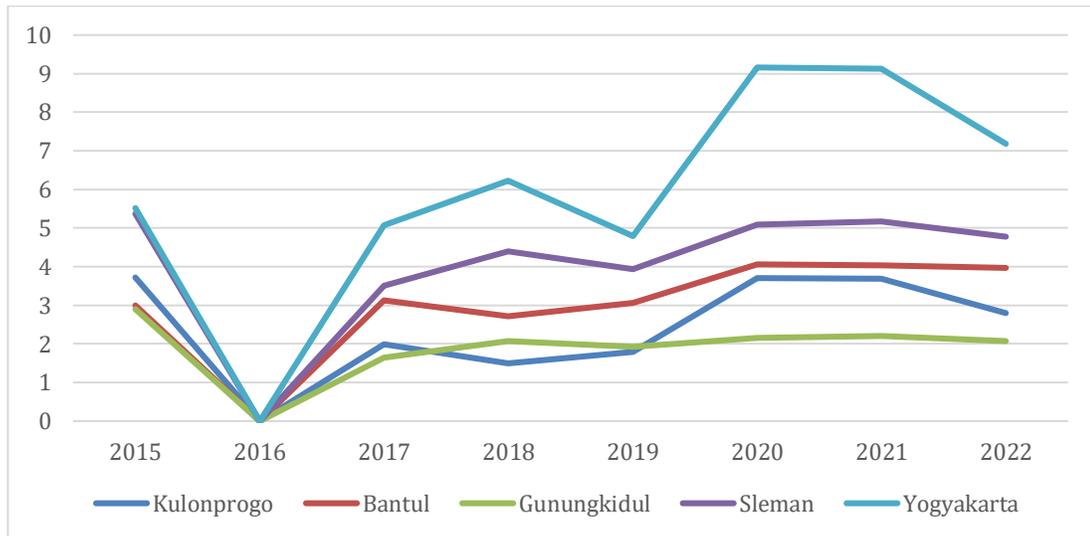
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang dengan kekayaan alam yang berlimpah memiliki potensi besar dalam perekonomian global. Namun, saat ini Indonesia masih dihadapkan dengan berbagai masalah, seperti kemiskinan, kepadatan penduduk, pendidikan, dan produktivitas tenaga kerja yang rendah. Berdasarkan hasil proyeksi jumlah penduduk Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2035 jumlah penduduk Indonesia akan mencapai lebih dari 300 juta jiwa dimana penduduk Indonesia didominasi oleh kelompok usia produktif yaitu antara 15-64 tahun. Hal ini menjadikan Indonesia memasuki era bonus demografi dimana usia produktif dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan pembangunan atau menjadi beban perekonomian seperti meningkatnya pengangguran. Pertumbuhan angkatan kerja baru yang cenderung terus meningkat setiap tahun, berbanding terbalik dengan penduduk usia angkatan kerja yang siap pakai. Sementara itu, pesatnya perkembangan Revolusi Industri 4.0 dan teknologi digital telah mengubah banyak sektor kehidupan, termasuk industri dan ketenagakerjaan.

Sebagai respons terhadap dinamika ini, pemerintah menetapkan Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai prioritas utama, mengakui bahwa kualitas SDM menjadi kunci penting untuk meraih keunggulan dalam persaingan global. Peningkatan kualitas tenaga kerja dianggap sebagai faktor krusial yang dapat meningkatkan daya saing suatu negara. (Putra, 2021). Penduduk usia kerja yang usianya 15 tahun atau lebih yang menganggur, bekerja atau sementara tidak bekerja dianggap sebagai pengangguran terbuka (BPS Indonesia, 2022). Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2023, jumlah pengangguran di Indonesia turun sekitar 6,77%, dibandingkan dengan Agustus 2022 (Annur, 2023). DIY merupakan salah satu provinsi yang mengalami penurunan tingkat pengangguran sebesar 0,29% pada Agustus 2020 hingga Februari 2021 dari aktivitas industri yang mulai bangkit pasca pandemi Covid-19 (Wardhani, 2022).

Normalnya mobilitas masyarakat seperti pariwisata dan mahasiswa yang kembali menempuh pendidikan telah menghidupkan kembali perekonomian di DIY.



Gambar 1. 1. Tingkat Pengangguran Terbuka di DIY tahun 2015-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Gambar 1.1 menjelaskan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di DIY pada tahun 2015 hingga 2022 mengalami fluktuasi. Kota Yogyakarta menjadi wilayah dengan nilai TPT tertinggi di DIY pada tahun 2022 yaitu sebesar 7,18 persen. Sleman menduduki peringkat kedua yang memiliki nilai TPT tertinggi di DIY sebesar 4,78 persen, ketiga Bantul sebesar 3,97 persen, Kulon Progo sebesar 2,8 persen, dan terakhir Gunung Kidul dengan nilai TPT terendah di DIY yaitu sebesar 2,08 persen pada tahun 2022.

Tingginya TPT di Kota Yogyakarta memunculkan pertanyaan kritis mengenai keberhasilan upaya dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Untuk menilai apakah usaha-usaha tersebut telah berhasil atau belum, salah satu parameter yang dapat digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia. IPM DIY mencapai angka 80,64, menempatkannya dalam

kategori sangat tinggi, dan mengalami pertumbuhan sebesar 0,52 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Prestasi IPM DIY selalu berada di atas rata-rata IPM Nasional, menjadikannya provinsi dengan peringkat kedua tertinggi di antara 34 provinsi di Indonesia, setelah Provinsi DKI Jakarta. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I. Yogyakarta) mencapai angka 80,64, masuk dalam kategori sangat tinggi, dengan pertumbuhan sebesar 0,52 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut melibatkan seluruh komponen, termasuk penyesuaian pada pengeluaran per kapita yang tumbuh sebesar 2,63 persen. Secara keseluruhan, setiap kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta mengalami peningkatan IPM, dengan Kabupaten Gunungkidul mencatatkan kenaikan tertinggi sebesar 1,14 persen, sementara Kabupaten Sleman memiliki pertumbuhan terendah sebesar 0,36 persen. Nilai IPM DIY yang sangat tinggi menggambarkan capaian kualitas ketiga dimensi pembangunan manusia yang ditunjukkan dengan indikator Umur panjang dan hidup sehat, Pengetahuan dan Standar hidup layak (BPS, 2022).

Melalui nilai IPM yang sangat tinggi, DIY menunjukkan bahwa masyarakatnya telah mencapai tingkat kualitas hidup yang baik, mencerminkan adanya peningkatan dalam aspek-aspek kunci pembangunan manusia. Dengan demikian, hasil IPM DIY memberikan gambaran positif terkait upaya pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota di Provinsi D.I.Yogyakarta tahun 2015- 2022 mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. IPM tertinggi diraih oleh Kota Yogyakarta yaitu sebesar 87,69%. Sleman menjadi wilayah kedua dengan nilai 84,31%, disusul oleh Bantul dengan nilai 80,69%, Kulon Progo sebesar 75,46% dan yang memiliki IPM terendah di antara kabupaten/kota di Provinsi D.I.Yogyakarta yaitu Kabupaten Gunung Kidul sebesar 70,96%. Peningkatan berkelanjutan dalam Indeks

Pembangunan Manusia dapat berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Provinsi D.I. Yogyakarta, sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

Kemiskinan mencerminkan suatu kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar sehari-harinya, termasuk sandang, pangan, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan. Keadaan kemiskinan memberikan dampak negatif yang meresahkan bagi suatu negara, mencakup peningkatan tingkat pengangguran, eskalasi kriminalitas, dan penurunan kualitas layanan kesehatan serta pendidikan. Penting untuk dicatat bahwa kemiskinan juga memiliki dampak serius terhadap kemajuan ekonomi suatu negara. Tingkat kemiskinan yang tinggi dapat menjadi penghalang signifikan dalam upaya pembangunan ekonomi, mengingat biaya yang harus dikeluarkan untuk menanggulangi dampak sosial dan ekonomi kemiskinan lebih besar.

Dalam konteks ini, keberhasilan pembangunan dapat diukur dengan menurunnya persentase dan jumlah penduduk miskin di suatu wilayah. Dalam mengatasi kemiskinan di D.I. Yogyakarta pemerintah telah meluncurkan berbagai skema bantuan untuk mendukung masyarakat, dengan harapan dapat meredam laju kemiskinan di wilayah DIY. Dengan upaya bantuan yang diberikan, diharapkan dapat menciptakan dampak positif dan mengurangi angka kemiskinan, sehingga membantu mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di provinsi D.I.Yogyakarta (DJPb PROV DIY, 2022).

Kemiskinan di DIY pada tahun 2015 hingga 2022 mengalami fluktuasi. Kemiskinan tertinggi tingkat kabupaten/kota di Provinsi D.I.Yogyakarta pada tahun 2022 dimiliki oleh Kulon Progo dengan nilai sebesar 16,39 persen. Peringkat kedua diduduki oleh Gunung Kidul dengan nilai sebesar 15,86 persen, ketiga Bantul yaitu sebesar 12,27 persen, Sleman sebesar 7,74 persen, dan terakhir Kota Yogyakarta yaitu sebesar 6,62 persen pada tahun 2022. Semakin rendah tingkat kemiskinan menunjukkan tingginya kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Upah merupakan kompensasi yang diberikan kepada pekerja sebagai balas jasa atas barang atau layanan yang telah diberikan selama proses produksi di suatu tempat, baik itu

perusahaan atau lembaga tertentu. Mankiw (2018) menjelaskan bahwa dalam kelompok tertentu yang mengalami tingkat pengangguran yang tinggi, upah minimum memiliki dampak yang signifikan karena upah minimum dapat menjadi kunci untuk memahami penyebab lain dari masalah pengangguran. Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Upah Minimum Provinsi (UMP) cenderung lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. UMP ditentukan oleh permintaan masyarakat terhadap barang dan layanan, dan faktor persaingan ekonomi juga memegang peran besar karena dengan berjalannya waktu, tingkat konsumsi masyarakat juga meningkat.

Upah Minimum Provinsi kabupaten/kota di Provinsi D.I.Yogyakarta cenderung memiliki tren positif karena terus mengalami kenaikan dari tahun 2015 hingga 2022. UMP tertinggi terletak di Kota Yogyakarta yaitu sebesar 2,153,970 rupiah, diikuti Sleman yaitu sebesar 2,001,000 rupiah, Bantul yaitu sebesar 1,916,848 rupiah, Kulon Progo yaitu sebesar 1,904,275 rupiah, dan terakhir Gunung Kidul dengan nilai UMP terendah di Pulau Jawa yaitu sebesar 1,900,000 rupiah pada tahun 2022.

Pertumbuhan penduduk adalah fenomena yang mendasar dalam perubahan demografis suatu negara atau wilayah. Angka pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan tekanan pada sumber daya dan infrastruktur, sementara pertumbuhan yang lambat dapat berdampak pada ekonomi dan keberlanjutan. Jumlah penduduk suatu wilayah memiliki dampak langsung pada sektor sosial dan ekonomi. Pertumbuhan penduduk yang cepat dapat menimbulkan tantangan seperti pengangguran, ketidaksetaraan, dan tekanan pada layanan dasar. Sebaliknya, pertumbuhan yang stabil dapat memberikan stabilitas ekonomi dan peluang pembangunan yang berkelanjutan. Informasi mengenai jumlah penduduk sangat penting untuk perencanaan pembangunan dan formulasi kebijakan. Pemerintah dan lembaga terkait menggunakan data demografis untuk merancang program-program kesehatan, pendidikan, perumahan, dan infrastruktur guna mengakomodasi kebutuhan populasi dengan efektif.

Jumlah Penduduk kabupaten/kota di Provinsi D.I.Yogyakarta tahun 2015-2022 mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Jumlah penduduk tertinggi tingkat kabupaten/kota di Provinsi D.I.Yogyakarta dimiliki oleh Sleman yaitu sebesar 1.282.804 jiwa. Urutan kedua dimiliki oleh Bantul dengan nilai sebesar 1.064.286 jiwa, disusul oleh Gunung Kidul dengan nilai sebesar 776.705 jiwa, Kota Yogyakarta sebesar 449.890 jiwa, dan terakhir Kulon Progo sebesar 448.131 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk dapat menciptakan persaingan lebih ketat di pasar tenaga kerja, yang mungkin berdampak pada tingkat pengangguran dan upah. Pengelolaan sumber daya manusia perlu ditingkatkan untuk mengakomodasi pertumbuhan populasi.

Penelitian mengenai determinan tingkat pengangguran di Indonesia, terutama di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dianggap sangat signifikan. DIY, yang ditandai oleh karakteristik ekonomi yang unik dan keberadaan institusi pendidikan tinggi yang penting, memberikan konteks yang menarik untuk menjelajahi dinamika tingkat pengangguran. Penelitian ini tidak hanya dapat memberikan wawasan mendalam tentang dampak kebijakan lokal terhadap tenaga kerja, tetapi juga mengidentifikasi konsekuensi pertumbuhan penduduk dan diversifikasi sektor ekonomi terhadap pasar tenaga kerja. Harapannya, temuan dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam merumuskan kebijakan yang efektif untuk mengatasi tingkat pengangguran di DIY, sekaligus memperluas pemahaman terhadap dinamika tenaga kerja di tingkat nasional. Melihat bonus demografi yang akan dihadapi Indonesia pada tahun 2030, penanganan kekurangan lapangan pekerjaan bagi penduduk usia produktif menjadi semakin mendesak. Oleh karena itu, penelitian mengenai faktor-faktor yang berperan dalam tingkat pengangguran di DIY menjadi sangat relevan dan strategis untuk diinvestigasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di DIY, dengan harapan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang efektif untuk mengatasi tantangan pengangguran di masa mendatang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan informasi latar belakang yang diberikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) selama periode 2015-2022?
2. Bagaimana jumlah penduduk berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dari tahun 2015 hingga 2022?
3. Bagaimana dampak Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam kurun waktu 2015-2022?
4. Bagaimana kemiskinan berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dari tahun 2015 hingga 2022?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap TPT di D.I.Yogyakarta tahun 2015-2022
2. Menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap TPT di D.I.Yogyakarta tahun 2015-2022
3. Menganalisis pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap TPT di D.I.Yogyakarta tahun 2015-2022
4. Menganalisis pengaruh kemiskinan terhadap TPT di D.I.Yogyakarta tahun 2015-2022

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yang diharapkan dapat memberikan gagasan dan manfaat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di D.I.Yogyakarta tahun 2015-2022. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mempunyai pengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka, mengetahui hal tersebut maka diperlukan perumusan kebijakan yang strategis dan intervensi yang tepat guna meningkatkan IPM dan secara langsung mengurangi TPT. Upaya tersebut dapat mencakup peningkatan akses pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan pelatihan keterampilan untuk mencapai hasil yang positif dalam mengelola dampak IPM terhadap tingkat pengangguran.
2. Mengetahui hubungan antara jumlah penduduk dan Tingkat Pengangguran Terbuka di D.I. Yogyakarta pada periode 2015-2022, hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan jumlah penduduk memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka. Oleh karena itu, untuk mengatasi dampak negatif ini, dibutuhkan strategi dan kebijakan yang dapat mengelola atau mengurangi pengaruh tersebut. Solusi efektif termasuk perencanaan ketenagakerjaan yang lebih baik, pelatihan keterampilan untuk meningkatkan daya saing pekerja, dan penciptaan peluang pekerjaan baru.
3. Mengetahui dampak Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di D.I. Yogyakarta selama periode 2015-2022, penelitian menunjukkan bahwa UMP memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran. Oleh karena itu, untuk mengatasi dampak negatif ini, diperlukan kebijakan yang tepat dan solusi strategis. Langkah-langkah yang dapat diambil termasuk penyesuaian UMP dengan proporsi yang seimbang, pelatihan keterampilan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja, serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi yang dapat menciptakan lapangan kerja. Dengan demikian, diharapkan

tindakan ini dapat memberikan dampak positif dalam penanggulangan Tingkat Pengangguran Terbuka yang dipicu oleh perubahan UMP.

4. Mengetahui pengaruh kemiskinan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di D.I.Yogyakarta tahun 2015-2022. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kemiskinan mempunyai pengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka, mengetahui hal tersebut maka diperlukan analisis yang mendalam dan solusi strategis untuk mengelola dampak pengaruh kemiskinan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka. Dengan pemahaman yang lebih mendalam ini, perlu dirancang kebijakan yang efektif dalam mengatasi tantangan pengangguran yang diakibatkan oleh kemiskinan. Upaya-upaya seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelatihan keterampilan, serta penciptaan peluang pekerjaan dapat menjadi strategi yang relevan untuk mengurangi dampak negatif kemiskinan pada tingkat pengangguran. Selain itu, perlu juga kebijakan yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui program sosial dan pembangunan ekonomi inklusif.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Muhammad Baihawafi & Asnita Frida Sebayang (2023) dengan judul penelitian “Pengaruh Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia dan Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran Terbuka”. Penelitian ini menggunakan data 27 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat selama 2018-2021 dengan metode regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM). Penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa variabel UMK berpengaruh positif dan signifikan, IPM dan Laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap TPT.

Lina Marlina (2022) dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia”. Metode penelitian yang digunakan regresi linier berganda dengan data runtut waktu (time series) dari tahun 2006-2020. Berdasarkan hasil regresi linier berganda, yaitu uji F hitung secara simultan IPM, Pertumbuhan ekonomi, dan UMP berpengaruh negatif dan signifikan. Sedangkan berdasarkan uji T secara parsial, IPM tidak berpengaruh signifikan, sedangkan Pertumbuhan ekonomi dan UMP berpengaruh signifikan terhadap TPT.

Soeharjoto & Mitha Rachma Oktavia (2021) dengan judul penelitian “Pengaruh Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Pengangguran Di Indonesia”. Metode yang digunakan yaitu analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi dan IPM berdampak negatif dan signifikan, sementara UMP tidak signifikan terhadap TPT.

Mustika Noor Mifrahi & Angga Setyo Darmawan (2022) dengan judul penelitian “Analisis tingkat pengangguran terbuka di Indonesia periode sebelum dan saat pandemi

covid-19”. Metode analisis yang digunakan adalah analisis uji beda dan pengujian data panel untuk setiap provinsi di Indonesia dari tahun 2010-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan nilai TPT di Indonesia pada periode sebelum dan saat pandemi Covid-19. Selain itu, faktor yang mempengaruhi nilai TPT dalam periode 2010-2021 yaitu laju pertumbuhan PDRB, IPM dan Covid 19. Sedangkan nilai tingkat UMP dan inflasi tidak berpengaruh signifikan pada TPT.

Joko Susanto (2021) dengan judul penelitian “Determinan Tingkat Pengangguran Terbuka di D.I. Yogyakarta”. Penelitian ini menggunakan regresi panel berdasarkan Fully Modified Ordinary Least Square (FMOLS) dan Dynamic Ordinary Least Square (DOLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berdampak negatif, sedangkan upah minimum kabupaten/kota berdampak positif terhadap pengangguran terbuka. Peningkatan pertumbuhan ekonomi mendorong penurunan pengangguran terbuka, sedangkan kenaikan upah minimum kabupaten diikuti oleh kenaikan tingkat pengangguran terbuka. Sementara itu, modal manusia tidak berpengaruh pada tingkat pengangguran terbuka akibat rendahnya rata-rata lama sekolah. Untuk itu, pemerintah perlu meningkatkan sumber daya manusia melalui wajib belajar 12 tahun.

Prakoso, E.S. (2020) dengan judul “Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Upah Minimum, Inflasi, dan Investasi terhadap Tingkat Pengangguran di Indonesia Periode 2010-2019”. Metode yang digunakan regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan, Inflasi, dan Upah Minimum menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap TPT, sedangkan Investasi Asing tidak memiliki dampak signifikan terhadap TPT.

Sisnita, A., & Prawoto, N. (2017) dengan judul penelitian “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Lampung Periode 2009-2015”. Penelitian ini menggunakan data 12 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Lampung dengan metode data panel. Penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa variabel Jumlah Penduduk dan IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap TPT di Provinsi

Lampung. Sedangkan UMP tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Lampung.

Ahmad Aswanto (2022) dengan judul penelitian “Pengaruh Jumlah Penduduk dan UMR terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Riau 2010-2020”. Metode yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan regresi linier berganda. Hasil kajian ini menemukan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah pengangguran sedangkan Upah Minimum Regional berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Riau 2010-2020.

Riska Garnella, dkk (2020) dengan judul penelitian “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM dan Kemiskinan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh”. Penelitian ini menggunakan data 10 kabupaten/kota di Provinsi Aceh dan time series selama 8 tahun dari 2011- 2018. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data panel dengan fixed effect model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Aceh. Sedangkan kemiskinan berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Aceh.

Ira Dwi Radila, dkk (2021) dengan judul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, dan Kemiskinan terhadap Pengangguran Di Provinsi Bali”. Metode yang digunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pendidikan berdampak negatif dan signifikan terhadap pengangguran. Sementara itu, variabel kemiskinan tidak memberikan pengaruh terhadap tingkat pengangguran.

Persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu yaitu terletak pada pemilihan variabel, lokasi dan metode penelitian yang digunakan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu mayoritas menggunakan variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Upah Minimum Provinsi (UMP). Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini tidak memakai variabel yang biasa digunakan seperti pertumbuhan ekonomi,

investasi dan inflasi namun menggunakan variabel lain seperti jumlah penduduk dan kemiskinan. Selain itu penelitian ini diperbarui dengan data dari tahun 2015 hingga tahun 2022 untuk melihat trends dari masing-masing variabel dari tahun ke tahun.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Tingkat Pengangguran Terbuka

Seorang pekerja yang aktif mencari pekerjaan untuk mendapatkan sejumlah uang tertentu , tetapi tidak dapat mendapatkan posisi yang diinginkan, dikatakan sebagai pengangguran. Sedangkan menurut Sukirno (1994) dalam buku Samudro, dkk (2021), pengangguran merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut. Pengangguran dapat terjadi disebabkan oleh ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta. Sedangkan menurut (Mankiw N. G., 2006) pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Sedangkan tingkat pengangguran adalah persentase dari perbandingan antara jumlah pengangguran dan jumlah angkatan kerja pada periode waktu tertentu.

Beberapa teori yang membahas mengenai pengangguran, contohnya teori penawaran tenaga kerja dan teori permintaan tenaga kerja. Teori permintaan tenaga kerja membahas hubungan antara tingkat upah dengan jumlah tenaga kerja yang diminta, jadi ketika tingkat upah mengalami kenaikan maka jumlah tenaga kerja yang diminta akan berkurang, hal ini menyebabkan pengangguran akan semakin bertambah (Feriyanto, 2014). Permintaan tenaga kerja juga merupakan turunan dari permintaan barang dan jasa, artinya ketika permintaan akan barang dan jasa meningkat maka permintaan tenaga kerja juga akan meningkat (Borjas, 2016).

Teori penawaran tenaga kerja membahas mengenai hubungan tingkat upah dengan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan, penawaran tenaga kerja dibedakan menjadi dua yaitu penawaran tenaga kerja jangka pendek dan penawaran tenaga kerja jangka panjang (Feriyanto, 2014). Dalam jangka pendek, populasi sudah terbatas dan keterampilan juga tertentu atau tidak bisa berubah akan tetapi dalam jangka panjang, populasi semakin bertambah yang menyebabkan penawaran tenaga kerja juga bertambah, serta keterampilan bisa berubah (Borjas, 2016). Dalam teori penawaran tenaga kerja, ketika jumlah penduduk bertambah maka jumlah tenaga kerja yang ditawarkan juga akan banyak, sehingga apabila jumlah penawaran tenaga kerja tidak sama dengan jumlah permintaan tenaga kerja hal ini akan menyebabkan semakin bertambahnya pengangguran (Borjas, 2016).

Menurut (Santoso, 2012), pengangguran dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu :

1) Pengangguran Friksional

Pengangguran friksional muncul karena kurangnya kesempurnaan informasi, menciptakan hambatan atau jeda bagi individu yang sedang mencari pekerjaan untuk menemukan peluang yang sesuai. Salah satu langkah kebijakan yang dapat diambil untuk mengurangi pengangguran friksional adalah meningkatkan aliran informasi antara pekerja dan perusahaan terkait kondisi pasar kerja. Melalui peningkatan informasi mengenai lowongan pekerjaan, kebijakan ini bertujuan untuk mempersempit kesenjangan antara pencari kerja dan peluang pekerjaan yang ada.

2) Pengangguran Struktural

Pengangguran struktural sering disebut juga dengan pengangguran karena adanya ketidaksesuaian atau mismatch, baik ketidaksesuaian pekerjaan maupun ketidaksesuaian geografis. Pengangguran struktural dibedakan menjadi:

1. *Occupational mismatch*, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja di suatu wilayah dengan kualifikasi yang dimiliki oleh tenaga kerja yang tersedia. Upaya yang dapat

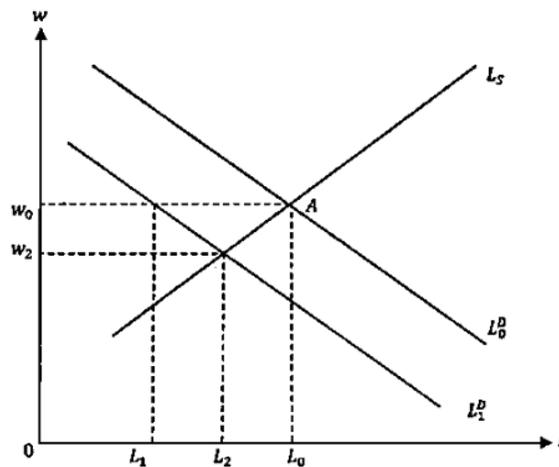
diterapkan untuk mengurangi pengangguran struktural adalah memberikan subsidi untuk pelatihan khusus yang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh para pemberi kerja.

2. *Geographical mismatch*, yaitu pengangguran yang timbul akibat ketidakseimbangan antara ketersediaan tenaga kerja dan kebutuhan tenaga kerja di berbagai wilayah dikenal sebagai *geographical mismatch*. Untuk mengatasi pengangguran struktural yang disebabkan oleh ketidaksesuaian geografis ini, kebijakan subsidi relokasi dapat diterapkan

3) Pengangguran Siklikal

Pengangguran siklikal terjadi karena adanya penurunan permintaan agregat, yang mengakibatkan kurva permintaan tenaga kerja bergeser ke kiri bawah dari posisi L_0 menjadi L_1 . Jika tingkat upah relatif infleksibel pada tingkat W_0 , dampaknya pada tingkat peluang kerja tidak hanya berhenti pada L_2 , tetapi bahkan menurun lebih jauh hingga mencapai titik L_1 . Oleh karena itu, terjadi peningkatan pengangguran yang lebih signifikan, sepanjang L_0L_1 . (Gambar 12.1).

Namun jika tingkat upah cukup fleksibel, adanya penurunan permintaan tenaga kerja akan menurunkan tingkat upah sampai pada W_2 . Kesempatan kerja akan turun pada L_2 namun tidak ada pengangguran kecuali pengangguran yang bersifat friksional.



Gambar 2. 1. Pengangguran Siklikal

4) Pengangguran Alamiah

Tingkat pengangguran alamiah melibatkan pengangguran friksional dan struktural, sementara tingkat pengangguran yang disebabkan oleh kekurangan permintaan tidak termasuk dalam kategori pengangguran alamiah.

2.2.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan manusia dalam suatu wilayah, dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti kesehatan, pendidikan, dan kehidupan layak. Fungsinya mencakup penggunaan sebagai pedoman dalam menetapkan prioritas dalam perumusan kebijakan serta program-program yang diimplementasikan pada tahap perencanaan pembangunan.

Menurut *United Nation Development Programme*(UNDP), indikator yang dipilih untuk mengukur dimensi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melibatkan beberapa aspek utama, antara lain:

- 1) *Longevity*, yang dinilai melalui harapan hidup saat lahir dan angka kematian bayi per seribu penduduk.
- 2) Pencapaian pendidikan, yang diukur melalui melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas dan tahun rata-rata bersekolah bagi penduduk 25 ke atas.
- 3) Akses terhadap sumber daya, yang dapat diukur melalui PDB riil per kapita dengan konsep purchasing power parity dalam dolar AS, dan dapat dilengkapi dengan pertimbangan tingkat partisipasi dalam angkatan kerja.

Rumus umum yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia adalah sebagai berikut:

$$IPM = 1/3 (\text{Indeks X1} + \text{Indeks X2} + \text{Indeks X3})$$

Dimana:

X1 = Indeks harapan hidup

X2 = Indeks pendidikan

X3 = Indeks standar hidup layak

Indeks Pembangunan Manusia dapat dikategorikan dalam beberapa peringkat yaitu :

- Tinggi : > 80,0
- Menengah Atas : 66,0 – 79,9
- Menengah Bawah : 50,0 – 65,9
- Rendah : < 50,0

Teori pertumbuhan baru yang diajukan oleh Theodore Schultz menjelaskan bahwa peningkatan pembangunan manusia dapat dicapai melalui pengembangan modal manusia, yang tercermin dalam peningkatan tingkat pendidikan dan kesehatan. Peningkatan ini

diharapkan dapat meningkatkan produktivitas manusia, sehingga mendorong peningkatan permintaan tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran.

Di sisi lain, teori Keynes menyatakan bahwa peningkatan daya beli masyarakat, yang mencerminkan peningkatan permintaan agregat, dapat memicu penurunan produksi perusahaan dan ketidakmampuan menyerap kelebihan tenaga kerja. Dengan demikian, kesenjangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja seringkali terjadi, menyebabkan tingkat pengangguran.

Hukum Okun atau Okun's Law menyatakan bahwa peningkatan produktivitas yang dihasilkan dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja, meningkatkan permintaan tenaga kerja, dan akhirnya mengurangi tingkat pengangguran.

2.2.3 Jumlah Penduduk

Menurut Badan Pusat Statistik, penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Subagiarta (2006) dalam buku Pratomo, dkk (2023) Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh tiga faktor utama: fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Meskipun demikian, struktur penduduk Indonesia memiliki perbedaan dengan negara-negara yang lebih maju. Struktur penduduk Indonesia cenderung lebih muda, dengan sebagian besar penduduk berusia muda. Mengingat bahwa hanya orang dewasa yang dapat bekerja, dan umumnya hanya ada satu pencari nafkah di setiap keluarga, hal ini berarti bahwa setiap orang yang bekerja harus menanggung beban hidup dari anggota keluarga yang cukup besar. Semakin banyak anggota keluarga yang harus dihidupi oleh satu orang yang bekerja, semakin rendah tingkat kesejahteraan penduduk.

Teori penduduk optimum menyatakan bahwa ada jumlah penduduk yang dapat memaksimalkan tingkat upah atau pendapatan riil per kapita. Jumlah ini tergantung pada faktor seperti teknologi dan sumber daya alam. Jika penduduk kurang dari jumlah optimum, pasar akan sempit; jika lebih, akan terjadi hukum hasil yang berkurang. Namun, teori ini sulit diterapkan karena sulit menentukan jumlah penduduk yang optimal, dan asumsi kestabilan dalam masyarakat sering tidak terpenuhi karena perubahan selera, penemuan baru, dan perkembangan teknologi.

Menurut Yasin (2007) dalam penelitian karya Rosyetti (2009), pertumbuhan penduduk dapat diperoleh dengan menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$P_t = P_o + (B - D) + (M_i - M_o)$$

Dimana:

P_o = jumlah penduduk pada waktu terdahulu (tahun dasar).

P_t = jumlah penduduk pada waktu sesudahnya (tahun ke t).

B = kelahiran yang terjadi pada jangka waktu antara dua kejadian tersebut.

D = kematian yang terjadi pada jangka waktu antara dua kejadian tersebut.

M_o = migrasi keluar pada jangka waktu antara kedua kejadian tersebut.

M_i = migrasi masuk pada jangka waktu antara kedua kejadian tersebut.

2.2.4 Upah Minimum Provinsi (UMP)

Upah Minimum Provinsi (UMP) ditetapkan oleh Gubernur di wilayah Provinsi masing-masing, sedangkan UMR ditetapkan oleh Bupati untuk wilayah Kabupaten/Kota. Imbalan berupa upah yang diterima pekerja selama sebulan dan pembayaran tersebut diberikan dalam bentuk uang tunai maupun komoditas. Sedangkan, Upah Minimum

adalah gaji bulanan terendah yang mencakup gaji pokok serta tunjangan tetap yang diputuskan oleh gubernur sebagai jaring pengaman (Feriyanto, 2014). Kelayakan UMR dan UMP dievaluasi menggunakan sejumlah faktor, antara lain pertumbuhan ekonomi daerah, kebutuhan hidup manusia (KHM) pekerja, dan tingkat inflasi.

Teori permintaan tenaga kerja Adam Smith menjelaskan bahwa permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu produktivitas dan upah. Smith berpendapat bahwa perusahaan akan mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja jika produktivitas tenaga kerja lebih tinggi daripada biaya upah yang dikeluarkan. Hal ini berarti bahwa jika karyawan dapat memproduksi lebih banyak dengan biaya upah yang sama, maka perusahaan akan cenderung merekrut lebih banyak karyawan. Smith juga menekankan pentingnya upah dalam menentukan permintaan tenaga kerja karena perusahaan akan mempekerjakan lebih banyak karyawan jika upah relatif rendah, karena biaya tenaga kerja akan lebih murah, sehingga tenaga kerja yang diminta akan meningkat dan pengangguran akan turun (Prasetyo & Huda, 2019). Feriyanto (2014) menjelaskan bila terjadi kenaikan upah maka perusahaan akan mengurangi jumlah tenaga kerja yang digunakan serta permintaan tenaga kerja akan turun sehingga pengangguran meningkat.

Menurut Feriyanto (2014), upah minimum dan pengangguran memiliki kaitan secara tidak langsung karena ketika upah mengalami peningkatan, pengusaha atau perusahaan akan mempekerjakan lebih sedikit orang dan tenaga kerja yang diminta akan turun sehingga pengangguran di masyarakat akan meningkat. Menurut penelitian Joko Susanto (2021), UMP secara positif berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), berarti jika upah yang diterima masyarakat naik maka pengangguran juga meningkat karena perusahaan harus menyesuaikan biaya produksinya agar mencapai laba.

2.2.5 Kemiskinan

Pudjirahaju (1999) dalam buku Khomsan, dkk (2015) BPS mengartikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi

kebutuhan pangan maupun non pangan. BPS menggunakan tingkat konsumsi penduduk dalam menghitung angka kemiskinan, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar. Dalam pendekatan ini, kemiskinan diartikan sebagai kurangnya kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik berupa makanan maupun non-makanan yang bersifat pokok. Pendekatan tersebut menggunakan indikator *Head Count Index* (HCI), yang mengukur persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan ditentukan berdasarkan jumlah rupiah yang dikeluarkan per kapita per bulan untuk mencukupi kebutuhan minimum pangan dan nonpangan. Kebutuhan minimum pangan merujuk pada standar 2.100 kkal/kapita/hari sesuai dengan panduan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi 1988. Sementara itu, pengeluaran minimum untuk perumahan, bahan bakar, sandang, pendidikan, kesehatan, dan transportasi merupakan bagian dari kebutuhan nonpangan yang harus dipenuhi.

Menurut Subandi (2012) kemiskinan adalah kondisi di mana masyarakat tidak dapat atau belum berpartisipasi dalam perubahan karena keterbatasan dalam memilih faktor produksi atau kualitas faktor produksi. Hal ini mengakibatkan masyarakat tidak dapat merasakan manfaat dari hasil proses pembangunan.

Menurut Sharp, et.al (1996: h. 173-191) dalam buku Mudrajad (1997) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi.

- 1) Pada tingkat mikro, timbulnya kemiskinan disebabkan oleh ketidaksetaraan dalam kepemilikan sumber daya, yang menghasilkan distribusi pendapatan yang tidak merata. Kelompok penduduk miskin hanya memiliki sumber daya terbatas dan berkualitas rendah.
- 2) Kemiskinan dapat muncul karena disparitas dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas rendah pada sumber daya manusia mengindikasikan produktivitas yang rendah, yang pada akhirnya mengakibatkan pendapatan yang rendah. Kualitas rendah ini dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang kurang memadai, ketidakberuntungan, adanya diskriminasi, atau faktor keturunan.

- 3) Adanya perbedaan akses terhadap modal juga dapat menjadi penyebab kemiskinan.

Ketiga faktor penyebab kemiskinan ini saling terhubung dan membentuk teori Nurkse yaitu teori lingkaran setan kemiskinan. Ketidakmampuan ekonomi, ketidaksempurnaan pasar, dan keterbatasan modal menyebabkan produktivitas rendah, yang pada gilirannya menghasilkan pendapatan yang minim.

Kemiskinan dibagi menjadi 4 jenis yaitu :

- 1) Kemiskinan absolut

Kemiskinan absolut merujuk pada kondisi di mana seseorang dianggap miskin karena pendapatannya berada di bawah ambang batas kemiskinan, sehingga tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari seperti sandang, pangan, tempat tinggal, layanan kesehatan, dan pendidikan yang diperlukan untuk kehidupan dan pekerjaan.

- 2) Kemiskinan relatif

Kemiskinan relatif merujuk pada kondisi di mana seseorang dianggap miskin karena dinilai dalam konteks distribusi pendapatan yang tidak merata. Ketidakmerataan dalam implementasi kebijakan pembangunan dapat menyebabkan disparitas pendapatan di antara masyarakat, yang pada gilirannya memicu kemiskinan relatif.

- 3) Kemiskinan kultural

Kemiskinan kultural merupakan kondisi kemiskinan yang dinilai berdasarkan sikap individu yang masih terpengaruh oleh faktor budaya, sehingga menghambat peningkatan standar hidup, seperti kurangnya motivasi untuk bekerja, kurangnya inisiatif untuk meningkatkan kondisi hidup, dan perilaku boros.

- 4) Kemiskinan struktural

Kemiskinan struktural merujuk pada kondisi kemiskinan yang berasal dari struktur sosial, budaya, dan politik yang tidak menguntungkan, sehingga sulit untuk mengatasi kemiskinan tersebut.

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan sementara yang hendak diuji untuk melihat kebenaran dari dugaan tersebut. Adapun hipotesis penelitian ini :

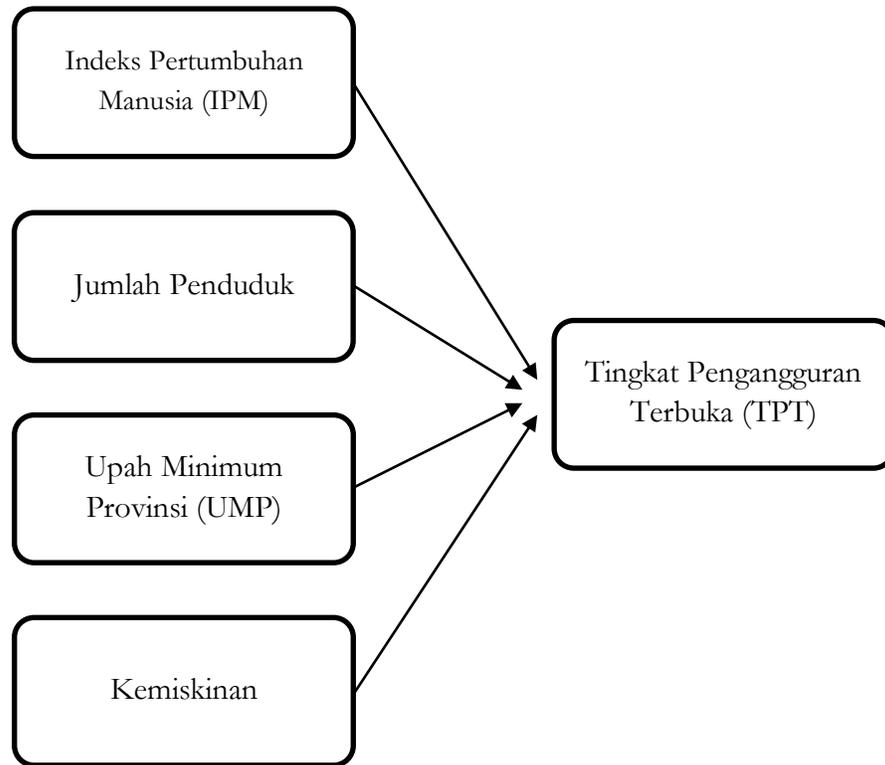
H1 : Diduga terdapat pengaruh negatif antara IPM terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka.

H2 : Diduga terdapat pengaruh positif antara jumlah penduduk terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka.

H3 : Diduga terdapat pengaruh positif antara UMP terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka.

H4 : Diduga terdapat pengaruh positif antara kemiskinan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka.

2.4 Kerangka Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Cara Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder. Penelitian ini menggunakan data panel yang menggabungkan data time series dan cross section. Data cross section dalam analisis ini meliputi data lima kabupaten/kota Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Jumlah penduduk, Upah Minimum Provinsi (UMP), dan kemiskinan di D.I. Yogyakarta. Sedangkan data time series dalam penelitian ini mencakup tahun 2015 hingga 2022. Sumber pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh dari situs resmi BPS D.I. Yogyakarta.

3.2 Definisi Variabel Operasional

Variabel dependen yang juga dikenal sebagai variabel output, kriteria, konsekuensi, atau hasil, adalah variabel yang dipengaruhi oleh atau merupakan akibat dari variabel independen (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini, fokus pada variabel dependen adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode tahun 2015-2022. Sementara itu, variabel independen, yang sering disebut sebagai variabel bebas, adalah variabel yang memiliki pengaruh atau menjadi penyebab perubahan atau munculnya variabel dependen (Sugiyono, 2019). Dalam kerangka penelitian ini, variabel independen mencakup Indeks Pembangunan Manusia (IPM), jumlah penduduk, Upah Minimum Provinsi (UMP), dan tingkat kemiskinan.

Tabel 3. 1. Definisi Variabel Operasional

Variabel	Variabel	Satuan	Definisi
Tingkat Pengangguran Terbuka	TPT	Persen	Persentase pengangguran terhadap angkatan kerja.
Indeks Pembangunan Manusia	IPM	Persen	Indikator untuk mengukur kualitas hidup manusia.
Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jiwa	Angka proyeksi jumlah penduduk di tahun periode penghitungan.
Upah Minimum Provinsi	UMP	Rupiah	Upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi.
Kemiskinan	Kemiskinan	Persen	Ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar.

3.3 Metode Analisis Data

Metode analisis regresi data panel dengan software STATA 16.0 digunakan untuk menganalisis data penelitian ini. Metode analisis regresi data panel digunakan untuk menganalisis data penelitian ini dengan persamaan sebagai berikut :

$$TPT_{it} = \beta_0 + \beta_1 IPM_{it} + \beta_2 JP_{it} + \beta_3 UMP_{it} + \beta_4 Kemiskinan_{it} + e_{it}$$

Keterangan :

i : observasi

t : periode waktu

TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

JP = Jumlah Penduduk

UMP = Upah Minimum Provinsi

Kemiskinan = Kemiskinan

3.3.1 Penentuan Metode Estimasi

a. *Fixed Effect Model* (FEM)

Metode FEM menurut Widarjono (2015), adalah metodologi yang memprediksi bahwa kemiringan setiap individu akan sama sementara intersepnya akan berbeda. Teknik FEM menggunakan variabel dummy untuk mencegah perbedaan untuk setiap individu.

b. *Random Effect Model* (REM)

Metode REM memperkirakan bahwa setiap individu memiliki intersepsi dan kesalahan yang berbeda. Metode ini digunakan untuk mengatasi adanya kekurangan parameter efisiensi akibat dari derajat kebebasan yang berkurang (Widarjono, 2015).

3.3.2 Metode Penentuan Model

a. Uji Hausman

Uji hausman bertujuan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel yang tepat menggunakan fixed effect atau random effect (Widarjono, 2015).

- Formula hipotesis

H_0 : REM lebih baik dari FEM

H_a : FEM lebih baik dari REM

- Menentukan derajat signifikansi $\alpha = 5\%$
- Kriteria pengujian:

H_0 diterima jika nilai prob $> \alpha$ (0,05)

H_a diterima jika nilai prob $< \alpha$ (0,05)

3.3.3 Uji Hipotesis

Setelah diketahui model estimasi yang tepat maka akan dilanjutkan dengan metode tersebut. Apabila hasil estimasi telah keluar, selanjutnya dilakukan uji hipotesis dengan :

a. Uji t (Parsial)

Uji t-statistik digunakan untuk menganalisis tingkat validitas masing-masing variabel independen. Untuk menguji variabel secara parsial, dilakukan dengan membandingkan probabilitas atau dilakukan dengan membandingkan nilai t-statistic dengan nilai t-tabel. Jika H_0 diterima, variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan, akan tetapi jika H_a diterima maka variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Widarjono, 2015).

b. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi menunjukkan seberapa baik variabel independen dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Variabel dependen dapat diprediksi menggunakan informasi dari variabel independen jika koefisien determinan mendekati 1 (Gujarati & Porter, 2012).

c. Uji F (Simultan)

Uji F-Statistic digunakan untuk menentukan apakah secara bersama-sama semua variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dalam konteks uji F, jika nilai signifikansi $F < \alpha$, hal ini menunjukkan bahwa secara kolektif variabel independen dalam penelitian memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Data Penelitian

Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta. Analisis data melibatkan satu variabel terikat yaitu TPT pada 5 kabupaten/kota selama 8 tahun, sehingga diperoleh observasi sebanyak 40. Sedangkan untuk variabel bebasnya ada 4 (empat) yaitu jumlah penduduk, upah minimum provinsi (UMP), indeks pembangunan manusia (IPM) dan kemiskinan. Berikut ini merupakan tabel mengenai deskripsi data dari tiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 4. 1. Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Std Dev	Min	Max
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3.928286	1.906988	1.49	9.16
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	78.37425	6.3306	67.41	87.69
Jumlah Penduduk	768851.3	320548.1	411056	1282804
Upah Minimum Provinsi (UMP)	1604777	282266.3	1108249	2153970
Kemiskinan	13.2545	4.977485	6.62	21.73

Tabel 4.1 memperlihatkan bahwa selama periode 2015-2022 variabel TPT memiliki nilai minimum sebesar 1.49 persen dan maksimum 9.16 persen dengan rata-rata 3,92 persen, serta standar deviasi 1,9 persen. Nilai min variabel IPM sebesar 67.41persen

dan maks 87.69 persen dengan rata-rata 78,3 persen serta standar deviasi 6,33 persen. Variabel jumlah penduduk memiliki nilai minimum sebesar 411056 jiwa dan maksimum 1282804 jiwa dengan rata-rata 768851 jiwa serta standar deviasi 320548 jiwa. Variabel UMP memiliki nilai minimum sebesar 1,1 juta rupiah dan maksimum 2,1 juta rupiah dengan rata-rata 1,6 juta rupiah serta standar deviasi sebesar 2,8 juta rupiah. Variabel kemiskinan memiliki nilai minimum sebesar 6.62 persen dan maksimum 21.73 persen dengan rata-rata 13.2 persen serta standar deviasi sebesar 4,97 persen. Semakin besar nilai standar deviasinya menunjukkan bahwa data tersebut semakin bervariasi dan mengalami fluktuasi.

4.2. Uji Kesesuaian Model

Pengujian pemilihan model regresi perlu dilaksanakan pada model regresi data panel. Salah satu uji yang relevan untuk hal ini adalah Uji Hausman. Uji ini berguna untuk memutuskan apakah model Random Effects atau Fixed Effects yang lebih sesuai dalam analisis data panel.

4.2.1. Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan untuk menentukan model terbaik antara fixed effect dan random effect. Jika nilai prob $< 0,05$ maka model fixed effect lebih baik dibandingkan dengan random effect.

4.3. Model Regresi Terbaik

Berdasarkan hasil Uji Hausman yang telah dilakukan maka untuk menentukan model yang paling tepat digunakan untuk mengestimasi data panel adalah fixed effect model.

Tabel 4. 2. Hasil pengujian FEM

Variable	Koefisien (Std. Error)	t	P> t
IPM	-1.651292* (.620)	-2.66	0.013
Jumlah Penduduk	-.0000252* (.0000109)	-2.31	0.029
UMP	.0000108***(2.24e-06)	4.83	0.000
Kemiskinan	.302372(.2023931)	1.49	0.147

*Note: Marginal effects and significances *p<.05, **p < .01, ***p<.001; standard errors in parenthesis*

Persamaan model secara umum regresi data panel adalah sebagai berikut :

$$TPT_{it} = 131.2954 - 1,651292(IPM)_{it} - 0,0000252(JP)_{it} + 0,0000108(UMP)_{it} + 0,302372(Kemiskinan)_{it} + e_{it}$$

Keterangan :

TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

JML PEND = Jumlah Penduduk

UMP = Upah Minimum Provinsi

Kemiskinan = Kemiskinan

4.3.1. Uji t (Parsial)

1. Pengujian Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

H_0 = variabel IPM tidak berpengaruh terhadap TPT

$H_a \neq$ variabel IPM berpengaruh terhadap TPT

Hasil regresi data panel menjelaskan bahwa variabel IPM memiliki nilai probabilitas sebesar $(0,013) < \alpha 5\%$ artinya menolak H_0 sehingga IPM berpengaruh secara signifikan terhadap TPT. Hasil regresi juga menjelaskan bahwa nilai koefisien IPM sebesar $-1,651292$ artinya IPM dan TPT memiliki hubungan negatif. Hubungan negatif ini artinya setiap kenaikan 1% IPM akan menurunkan jumlah pengangguran sebesar 1,651292 persen. Hal ini berarti bahwa variabel IPM berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di D.I.Yogyakarta tahun 2015-2022.

2. Pengujian Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

H_0 = variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap TPT

$H_a \neq$ variabel jumlah penduduk berpengaruh terhadap TPT

Hasil regresi data panel menjelaskan bahwa variabel jumlah penduduk memiliki nilai probabilitas sebesar $(0,029) < \alpha 5\%$ artinya menolak H_0 sehingga jumlah penduduk berpengaruh secara signifikan terhadap TPT. Hasil regresi juga menjelaskan bahwa nilai koefisien jumlah penduduk sebesar $-0,0000252$ artinya jumlah penduduk dan TPT memiliki hubungan negatif. Hubungan negatif ini artinya setiap kenaikan 1% jumlah penduduk akan menurunkan jumlah pengangguran sebesar 0,0000252 persen. Hal ini berarti bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di D.I.Yogyakarta tahun 2015-2022.

3. Pengujian Upah Minimum Provinsi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

H_0 = variabel UMP tidak berpengaruh terhadap TPT

$H_a \neq$ variabel UMP berpengaruh terhadap TPT

Hasil regresi data panel menjelaskan bahwa variabel UMP memiliki nilai probabilitas sebesar $(0,000) < \alpha 5\%$ artinya menolak H_0 sehingga UMP berpengaruh secara signifikan terhadap TPT. Hasil regresi juga menjelaskan bahwa nilai koefisien UMP sebesar 0,0000108 artinya UMP dan TPT memiliki hubungan positif. Hubungan positif ini artinya setiap kenaikan 100.000 ribu akan meningkatkan jumlah pengangguran sebesar 1,08 persen. Hal ini berarti bahwa variabel UMP berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di D.I.Yogyakarta tahun 2015-2022.

4. Pengujian Kemiskinan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

H_0 = variabel kemiskinan tidak berpengaruh terhadap TPT

$H_a \neq$ variabel kemiskinan berpengaruh terhadap TPT

Hasil regresi data panel menjelaskan bahwa variabel kemiskinan memiliki nilai probabilitas sebesar $(0,147) < \alpha 5\%$ artinya menerima H_0 sehingga kemiskinan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap TPT.

4.3.2. Koefisien Determinasi(R²)

Untuk menjelaskan hubungan antar variabel dapat menggunakan koefisien determinasi (R²). Hasil regresi menjelaskan nilai R-squared (R²) sebesar 0,6094. Hal ini menjelaskan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dijelaskan oleh variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM), jumlah penduduk, Upah Minimum Provinsi (UMP), dan kemiskinan sebesar 60,9% sisanya 39,1% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

4.3.3. Uji F (Simultan)

Hasil regresi data panel menunjukkan bahwa Prob. (F-statistic) sebesar 0,00. Keputusan dari hasil regresi adalah nilai prob $(0,00) < \alpha (0,05)$ artinya menolak H_0 . Hal ini berarti bahwa seluruh variabel independen (Indeks Pembangunan Manusia (IPM), jumlah penduduk, Upah Minimum Provinsi (UMP), dan kemiskinan) berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Yogyakarta.

4.4. Pembahasan

Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM), jumlah penduduk, Upah Minimum Provinsi (UMP), dan kemiskinan secara bersama-sama memiliki dampak yang signifikan terhadap variabel dependen, Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Yogyakarta tahun 2015-2022. Tetapi secara parsial berdasarkan uji t tidak semua variabel berpengaruh terhadap variabel TPT. Satu-satunya variabel yang tidak berdampak pada TPT di Provinsi Yogyakarta tahun 2015-2022 adalah variabel kemiskinan.

Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi variabel pertama yang diuji secara parsial. Uji yang dilakukan menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di D.I.Yogyakarta tahun 2015-2022. Berpengaruh secara negatif berarti ketika IPM meningkat akan menurunkan jumlah pengangguran. Penelitian ini serupa dengan penelitian Baihawafi & Asnita (2023), Soeharjoto & Oktavia (2021) dan Riska Garnella, dkk (2020) yang menyatakan bahwa ketika suatu wilayah berhasil meningkatkan Indeks Pembangunan Manusianya, hal ini dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, yang pada gilirannya dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran. Sedangkan menurut penelitian Sisnita, A., & Prawoto, N. (2017) menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh secara positif dan signifikan yang artinya peningkatan IPM akan meningkatkan pengangguran.

Uji yang dilakukan menyatakan bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di D.I.Yogyakarta tahun 2015-2022. Berpengaruh secara negatif artinya meningkatnya jumlah penduduk akan menurunkan jumlah pengangguran. Hal ini serupa dengan penelitian Aswanto, A (2022) yang menyatakan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk yang terus berlangsung dapat secara efektif diakomodasi oleh pertumbuhan lapangan pekerjaan, berpotensi memberikan dorongan pada perekonomian, dan dapat mengurangi tingkat pengangguran. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam sumber daya manusia agar mereka memiliki keterampilan dan daya saing yang diperlukan untuk berhasil di dunia kerja. Implementasi kebijakan yang sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan menciptakan banyaknya lapangan pekerjaan menjadi suatu keharusan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Sedangkan menurut Sisnita, A., & Prawoto, N. (2017) menyatakan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan yang artinya peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan pula TPT.

Uji yang dilakukan menunjukkan bahwa di D.I.Yogyakarta tahun 2015-2022, UMP memberikan dampak yang signifikan dan mempunyai hubungan positif dengan TPT. Hubungan positif ini menunjukkan bahwa semakin tinggi UMP maka TPT akan meningkat, hal ini sejalan dengan penelitian Susanto & Pratama (2021) yang menjelaskan bahwa dalam jangka pendek, kenaikan upah minimum mengakibatkan peningkatan biaya tenaga kerja sehingga perusahaan melakukan substitusi tenaga kerja dengan kapital. Hal ini berarti kenaikan upah diikuti dengan kenaikan pengangguran. Berbeda dengan penelitian Lina Marliana (2022), Baihawafi & Asnita (2023), Mifrahi & Darmawan (2022) dan Prakoso (2020) bahwa setiap kenaikan upah minimum akan mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Penyebabnya bisa dikatakan karena upah minimum yang ditetapkan pemerintah terus meningkat, dimana kenaikan tersebut meningkatkan daya beli masyarakat.

Uji yang dilakukan menyatakan bahwa kemiskinan di D.I.Yogyakarta tahun 2015-2022 tidak berpengaruh signifikan terhadap 'TPT' dan memiliki hubungan yang positif. Hubungan positif ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kemiskinan tidak berpengaruh terhadap 'TPT'. Hal ini serupa dengan penelitian Riska Garnella, dkk (2020) & Ira Dwi Radila, dkk (2021) yang menyatakan bahwa penurunan kemiskinan tidak berpengaruh terhadap 'TPT'.

BAB V

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Simpulan

Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di D.I.Yogyakarta tahun 2015-2022. Berpengaruh secara negatif berarti ketika IPM meningkat akan menurunkan TPT begitupun sebaliknya ketika IPM mengalami penurunan maka TPT di D.I.Yogyakarta akan meningkat.
2. Jumlah penduduk berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di D.I.Yogyakarta tahun 2015-2022. Artinya meningkatnya jumlah penduduk akan menurunkan jumlah pengangguran.
3. Upah Minimum Provinsi (UMP) di D.I.Yogyakarta memberikan dampak yang signifikan dan mempunyai hubungan positif dengan TPT. Hubungan positif ini menunjukkan bahwa semakin tinggi UMP maka TPT akan meningkat.
4. Kemiskinan di D.I.Yogyakarta tahun 2015-2022 tidak berpengaruh signifikan terhadap TPT dan memiliki hubungan yang positif. Hubungan positif ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kemiskinan tidak berpengaruh terhadap TPT.

5.2 Implikasi

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mempunyai pengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas hidup masyarakat, yang tercermin dalam peningkatan IPM, dapat secara efektif mengurangi tingkat pengangguran. Dengan kata lain, investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan aspek-aspek pembangunan manusia lainnya dapat menjadi strategi yang efektif untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan

kesejahteraan ekonomi masyarakat di DIY. Implikasi yang dapat dilakukan adalah pemerintah dan pemangku kepentingan dapat merumuskan kebijakan yang lebih terarah, dengan meningkatkan investasi dalam sektor-sektor yang berkontribusi pada peningkatan IPM, seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, perluasan pelatihan dan pengembangan keterampilan di DIY dapat ditingkatkan sebagai langkah konkret untuk meningkatkan kualifikasi tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Implikasi lainnya mencakup dorongan untuk mendukung pertumbuhan sektor-sektor yang memperkuat hubungan antara pembangunan manusia dan kesempatan kerja, seperti sektor pendidikan, teknologi, dan pelayanan. Keseluruhan, temuan ini memberikan landasan bagi perancangan kebijakan yang holistik dan berkelanjutan, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat DIY.

2. Jumlah penduduk berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) antara tahun 2015 hingga 2022 memiliki dampak yang signifikan dalam merumuskan kebijakan dan strategi ketenagakerjaan. Artinya, pertumbuhan jumlah penduduk dapat diartikan sebagai peluang positif dalam mengurangi tingkat pengangguran. Penurunan TPT seiring dengan peningkatan jumlah penduduk menunjukkan bahwa ekspansi ekonomi dapat memberikan kesempatan kerja yang lebih luas, mendukung kesejahteraan masyarakat DIY. Implikasi ini mengindikasikan perlunya kebijakan pembangunan ekonomi yang terarah, dengan fokus pada penciptaan lapangan kerja dan pelatihan tenaga kerja. Namun, perlu diingat bahwa pertumbuhan penduduk yang berkelanjutan juga perlu dikelola dengan bijak untuk menghindari tekanan berlebihan pada sumber daya dan infrastruktur. Dengan demikian, temuan ini memberikan dasar bagi pihak berwenang untuk mengembangkan strategi kebijakan yang memanfaatkan pertumbuhan penduduk sebagai katalisator untuk pengurangan tingkat pengangguran, sambil tetap memperhatikan keberlanjutan pembangunan di DIY.

3. Upah Minimum Provinsi (UMP) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memberikan dampak signifikan dan memiliki hubungan positif dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) membawa implikasi strategis dalam perancangan kebijakan ketenagakerjaan. Artinya, kenaikan UMP di DIY dapat menjadi pendorong untuk pertumbuhan tingkat pengangguran. Implikasi utamanya mencakup tantangan bagi perusahaan dalam mengelola biaya produksi yang meningkat, khususnya di sektor-sektor dengan intensitas tenaga kerja tinggi. Namun, kebijakan ini juga dapat memberikan insentif bagi peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekerja, asalkan diimbangi dengan langkah-langkah strategis yang mendukung pelatihan, peningkatan keterampilan, dan efisiensi operasional. Pentingnya dialog terbuka dan kolaboratif antara pemerintah, perusahaan, dan serikat pekerja menjadi semakin jelas untuk mencapai keseimbangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan pekerja secara bersamaan. Dengan pemahaman yang matang terhadap implikasi ini, kebijakan UMP di DIY dapat dirancang agar efektif dalam mendukung keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan sosial di tingkat provinsi.
4. Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) antara tahun 2015 hingga 2022 tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan memiliki hubungan yang positif mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut. Meskipun tidak terbukti secara signifikan memengaruhi TPT, hubungan positif ini menyoroti pentingnya mengembangkan program pemberdayaan ekonomi yang dapat melibatkan masyarakat yang berada dalam kondisi kemiskinan. Fokus pada pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan penciptaan peluang kerja di sektor-sektor tertentu menjadi relevan untuk meningkatkan kesejahteraan dan membuka pintu bagi masyarakat yang berada dalam garis kemiskinan. Selain itu, temuan ini menunjukkan perlunya koordinasi yang lebih erat antara kebijakan kemiskinan dan ketenagakerjaan untuk mencapai dampak yang lebih maksimal. Meskipun temuan ini memberikan arah, analisis

lebih lanjut dan data yang lebih mendalam dapat memberikan wawasan lebih lanjut untuk merancang strategi kebijakan yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan kompleks di DIY.

DAFTAR PUSTAKA

- Annur, C. M. (2023, 11 7). From [databoks.katadata.co.id: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/07/pengangguran-ri-turun-jadi-786-juta-orang-per-agustus-2023](https://databoks.katadata.co.id/databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/07/pengangguran-ri-turun-jadi-786-juta-orang-per-agustus-2023)
- Aswanto, A. (2022). Pengaruh Jumlah Penduduk dan UMR terhadap Jumlah Pengangguran di Provinsi Riau 2010-2020. *Jurnal IKRAITH-EKONOMIKA*, 5(2).
- Baihawafi, M., & Sebayang, A. F. (2023). Pengaruh Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia dan Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran Terbuka. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Ekonomi (JRIEB)*.
- Borjas, G. J. (2016). *Labor Economics*. New York: Mc Graw Hill Education.
- BPS. (2022, 12 01). From [yogyakarta.bps.go.id: https://yogyakarta.bps.go.id/pressrelease/2022/12/01/1239/indeks-pembangunan-manusia--ipm--d-i--yogyakarta-2022.html](https://yogyakarta.bps.go.id/pressrelease/2022/12/01/1239/indeks-pembangunan-manusia--ipm--d-i--yogyakarta-2022.html)
- BPS. (2024). From [kebumenkab.bps.go.id: https://kebumenkab.bps.go.id/subject/12/Kependudukan.html#subjekViewTab1](https://kebumenkab.bps.go.id/subject/12/Kependudukan.html#subjekViewTab1)
- DJPb PROV DIY. (2022, Juni 2). Kajian Fiskal Regional D.I. Yogyakarta Tahun 2021. *Perkembangan Indikator Ekonomi Makro dan Kesejahteraan*, pp. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/diy/id/data-publikasi/artikel/3293-kajian-fiskal-regional-d-i-yogyakarta-tahun-2021.html#:~:text=Tingkat%20Pengangguran%20Terbuka%20%28TPT%29%20DIY%20kondisi%20Agustus%202021,dengan%20TPT%20tertinggi%20adalah%20Kota%20Yo.>
- Feriyanto, N. (2014). *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Indonesia*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Garnella, R., Wahid, N., & Yulindawati. (2020). PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DAN

- KEMISKINAN TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI PROVINSI ACEH. *Jurnal Ilmiah dan Ekonomi Bisnis Islam (JIMEBIS)*, 1(1).
- Gujarati, D., & Porter, D. (2012). *Dasar-dasar Ekonometrika*. Salemba Empat.
- Khomsan, A., Dharmawan, A., Saharrudin, Alfiasari, Syarief, H., & Sukandar, D. (2015). *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kuncoro, M. (1997). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mankiw, N. G. (2006). *Makroekonomi (Edisi 6)*. Penerbit Erlangga.
- Mankiw, N. G. (2018). *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Salemba Empat.
- Marliana, L. (2022). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1).
- Mifrahi, M. N., & Darmawan, A. S. (2022, Juni). Analisis tingkat pengangguran terbuka di Indonesia periode sebelum dan saat pandemi covid-19. *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan*, 1(1).
- Prakoso, E. S. (2020). ANALISIS PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, UPAH MINIMUM, INFLASI DAN INVESTASI TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI INDONESIA PERIODE 2010-2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 9(2).
- Prasetyo, A., & Huda, M. (2019). Analisis Peranan Usaha Kecil Dan Menengah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Kebumen. *Fokus Bisnis*, 26–35.
- Pratomo, W. A., Soeparno, W. I., & Rahman, A. (2023). *Data Kependudukan Dalam Pemenuhan Fasilitas Sosial Dan Ekonomi*. Medan: Merdeka Kreasi Group.
- Putra, D. A. (2021). *Masalah Tenaga Kerja di Indonesia: Pengangguran Tinggi dan Produktivitas Rendah*. From <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4576352/masalah-tenaga-kerja-di-indonesia-pengangguran-tinggi-dan-produktivitas-rendah?page=2>
- Radila, I. D., Priana, W., & Wahed, M. (2021). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, dan Kemiskinan terhadap Pengangguran Di Provinsi Bali. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(6). From <https://doi.org/10.46799/jsa.v2i6.252>

- Rosyetti. (2009). Studi Keterkaitan Pertumbuhan Penduduk dengan Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Sengingi. *Jurnal Ekonomi*, 52-53.
- Samudro, B. R., Soesilo, A., Sistriatmaja, B., Pratama, Y. P., & Sarungu, J. (2021). *EKSISTENSI KEPALA DAERAH PEREMPUAN TERHADAP PERFORMA SOSIOEKONOMI DAERAH DI INDONESIA*. Gracias Logis Kreatif.
- Santoso, R. P. (2012). *Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN .
- Sisnita, A., & Prawoto, N. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Lampung (Periode 2009-2015). *Journal of Economics Research and Social Sciences*, 1(1), 1-7.
- Soeharjoto, & Oktavia, M. R. (2021). Pengaruh Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah . *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis*, 5(2).
- Subagiarta. (2006).
- Subandi. (2012). *Ekonomi Pembangunan*. ALFABETA.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Susanto, J., & Pratama, M. A. (2021). DETERMINAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI D.I. YOGYAKARTA.
- Wardhani, C. M. (2022, 11 9). (G. Lufityanti, Editor) From jogja.tribunnews.com: <https://jogja.tribunnews.com/2022/11/09/tingkat-pengangguran-terbuka-diy-tahun-2022-turun-tipis-jadi-406-persen>
- Widarjono, A. (2015). *Statistika Terapan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

LAMPIRAN

Lampiran A. Ringkasan Statistik

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
Tahun	40	2018.5	2.320477	2015	2022
Kab_Kota	0				
kode_kab	40	3	1.43223	1	5
Jml_Pend	40	768851.3	320548.1	411056	1282804
UMP	40	1604777	282266.3	1108249	2153970
IPM	40	78.37425	6.3306	67.41	87.69
Pengangguran	35	3.928286	1.906988	1.49	9.16
Kemiskinan	40	13.2545	4.977485	6.62	21.73
_est_fixed	40	.875	.3349321	0	1
_est_random	40	.875	.3349321	0	1

Lampiran B. Hasil Uji *Fixed Effect Model*

Fixed-effects (within) regression
 Group variable: kode_kab

Number of obs = 35
 Number of groups = 5

R-sq:

within = 0.6094
 between = 0.3584
 overall = 0.2459

Obs per group:

min = 7
 avg = 7.0
 max = 7

corr(u_i, Xb) = -0.9952

F(4,26) = 10.14
 Prob > F = 0.0000

Pengangguran	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
Jml_Pend	-.0000252	.0000109	-2.31	0.029	-.0000477	-2.75e-06
UMP	.0000108	2.24e-06	4.83	0.000	6.23e-06	.0000155
IPM	-1.651292	.6202704	-2.66	0.013	-2.926276	-.3763078
Kemiskinan	.302372	.2023931	1.49	0.147	-.113653	.718397
_cons	131.2954	48.20384	2.72	0.011	32.211	230.3798
sigma_u	17.458883					
sigma_e	.68877756					
rho	.998446	(fraction of variance due to u_i)				

F test that all u_i=0: F(4, 26) = 12.06

Prob > F = 0.0000

Lampiran C. Hasil Uji *Random Effect Model*

```

Random-effects GLS regression           Number of obs   =       35
Group variable: kode_kab               Number of groups =        5

R-sq:                                   Obs per group:
  within = 0.0314                        min =           7
  between = 0.9692                       avg =          7.0
  overall = 0.7152                       max =           7

corr(u_i, X) = 0 (assumed)              Wald chi2(4)    =       75.34
                                           Prob > chi2     =       0.0000

```

Pengangguran	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
Jml_Pend	-1.53e-06	6.33e-07	-2.41	0.016	-2.77e-06	-2.85e-07
UMP	5.85e-07	7.63e-07	0.77	0.444	-9.11e-07	2.08e-06
IPM	.1986577	.0862487	2.30	0.021	.0296134	.367702
Kemiskinan	-.06441	.1161383	-0.55	0.579	-.2920369	.1632169
_cons	-10.61066	8.53208	-1.24	0.214	-27.33323	6.111912
sigma_u	0					
sigma_e	.68877756					
rho	0	(fraction of variance due to u_i)				

Lampiran D. Hasil Uji Hausman

	Coefficients			
	(b) fem	(B) rem	(b-B) Difference	sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E.
Jml_Pend	-.0000252	-1.53e-06	-.0000237	.0000109
UMP	.0000108	5.85e-07	.0000103	2.11e-06
IPM	-1.651292	.1986577	-1.849949	.6142446
Kemiskinan	.302372	-.06441	.366782	.1657554

b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
 B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

Test: Ho: difference in coefficients not systematic

```

chi2(2) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
         =      66.22
Prob>chi2 =      0.0000
(V_b-V_B is not positive definite)

```

Lampiran E. Data Penelitian

Tahun	Kab_Kota	Pengangguran	Jml_Pend	Kemiskinan	UMP	IPM
2022	Kulonprogo	2,8	448131	16,39	1904275	75,46
2021		3,69	442724	18,38	1770000	74,71
2020		3,71	437373	18,01	1750500	74,46
2019		1,8	432058	17,39	1613200	74,44
2018		1,49	426767	18,3	1493250	73,76
2017		1,99	421500	20,03	1373600	73,23
2016		-	416261	20,3	1268870	72,38
2015		3,72	411056	21,4	1138000	71,52
2022	Bantul	3,97	1064286	12,27	1916848	80,69
2021		4,04	1050308	14,04	1805000	80,28
2020		4,06	1036489	13,5	1790500	80,01
2019		3,06	1022788	12,92	1649800	80,01
2018		2,72	1009171	13,43	1572150	79,45
2017		3,12	995639	14,07	1404760	78,67
2016		-	982201	14,55	1297700	78,42
2015		3	968868	16,33	1163800	77,99
2022	Gunungkidul	2,08	776705	15,86	1900000	70,96
2021		2,2	767464	17,69	1842460	70,16
2020		2,16	758316	17,07	1705000	69,98
2019		1,92	749229	16,61	1571000	69,96
2018		2,07	740181	17,12	1454200	69,24
2017		1,65	731170	18,65	1337650	68,73
2016		-	722205	19,34	1235700	67,82
2015		2,9	713294	21,73	1108249	67,41

2022	Sleman	4,78	1282804	7,74	2001000	84,31
2021		5,17	1265429	8,64	1903500	84
2020		5,09	1248258	8,12	1846000	83,84
2019		3,93	1231246	7,41	1701000	83,85
2018		4,4	1214346	7,65	1574550	83,42
2017		3,51	1197563	8,13	1448385	82,85
2016		-	1180908	8,21	1338000	82,15
2015		5,37	1164392	9,46	1200000	81,2
2022	Yogyakarta	7,18	449890	6,62	2153970	87,69
2021		9,13	444295	7,64	2069530	87,18
2020		9,16	438761	7,27	2004000	86,61
2019		4,8	433267	6,84	1848400	86,65
2018		6,22	427801	6,98	1709150	86,11
2017		5,08	422363	7,64	1572200	85,49
2016		-	416958	7,7	1452400	85,32
2015		5,52	411589	8,75	1302500	84,56